

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional rill. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Sukirno,2000) dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional rill yang dicapai oleh suatu negara.

(Sukirno,1994) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : modal, tenaga kerja, dan teknologi.

(Lincolin,1997) Pertumbuhan Ekonomi merupakan kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi pertumbuhan struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

(Todaro,2005) Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui pembangunan dimasa yang akan datang.

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand –AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan makin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi. Ada beberapa kegunaan dari pertumbuhan ekonomi yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Memperluas kesempatan

kerja, Memperbaiki distribusi pendapatan, Sebagai persiapan untuk kemajuan selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Menurut tokoh ekonomi klasik dalam (Sukirno,2004) Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam sistem produksi suatu negara, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Luas tanah yang dapat dipergunakan dalam proses produksi.
4. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga

negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap.

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan

menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian, yaitu:

1. Penilaian Atas dasar Harga Berlaku. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode perhitungan.
2. Penilaian atas dasar harga konstan. Dalam sistem ini maka barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar.

2.1.1.2 Perhitungan PDRB

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah

dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data Provinsi.

Untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (x - m)$$

Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga,

I adalah pembentukan modal,

G adalah pengeluaran pemerintah,

dan $(x - m)$ adalah selisih nilai ekspor dan impor.

Perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig).

G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

Untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat diketahui melalui pendekatan model pertumbuhan neo klasik dengan memusatkan perhatian pada fungsi produksi cobb-douglas.

Menurut (Arsyad,1999) fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat dituliskan dengan cara berikut:

$$Y = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

Dimana

Y = total produksi,

L = tenaga kerja,

k = modal,

A = produktivitas faktor

total, α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia.

2.1.2 Tenaga Kerja

2.1.2.1 Definisi Tenaga kerja

Menurut Djojohadikusumo tenaga kerja adalah orang yang bersedia dan sanggup dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk bayaran/upah/gaji.

Simanjuntak mendefinisikan Tenaga Kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu waktu dapat menawarkan barang dan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potensial labor force (Simanjuntak, 1985).

Menurut pokok ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja.

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dr. A. Hamzah,SH mendefinisikan tenaga kerja ialah yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri baik tenaga kerja fisik maupun pikiran

Dr. Payaman dikutip dari A. Hamzah menyatakan bahwa tenaga kerja ialah yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan,serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.

2.1.2.2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokkan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

1. Berdasarkan penduduknya

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang tenaga

kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang tenaga kerja No 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia yaitu mereka yang berusia dibawah 15 Tahun dan berusia diatas 64 Tahun. Contohnya kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia dan anak anak.

2. Berdasarkan batas kerja

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usai produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah, megurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para inu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

3. Berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal dan nonformal). Contohnya pengacara, dokter, guru dan lain lain.

2. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain lain,

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga.

Faktor produksi tenaga kerja merupakan produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi. Bukan hanya dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi kualitas dan macam-macam tenaga kerja. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi yang skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, pembagian kerja menghasilkan pembagian kemampuan produksi para pekerja. Setiap pekerja menjadi efisien dari sebelumnya. Jika produksi meningkat, pada akhirnya laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Nilai tenaga kerja yang dicerminkan dengan upah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia tersebut. Makin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut makin tinggi pula upah yang diterima, begitu juga sebaliknya jika kualitas tenaga kerja tersebut rendah maka tingkat upah yang diterima juga rendah. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian yaitu, Sumber daya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumber daya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumberdaya manusia yang mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, sumber daya manusia yang menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja adalah mampu untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis yang berupa barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

2.1.2.3 Teori ketenagakerjaan

Ada beberapa teori penting yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan diantaranya adalah teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Menurut teori Fei- Ranis yang berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumberdaya alamnya belum dapat diolah, sebagian penduduknya bergerak disektor pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama dimana pengangguran semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih dari upah institusional. Ketiga, dimana tahap awal ditandai

dengan pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output yang lebih daripada perolehan upah konstitusional.

Sedangkan menurut Mankiw, membedakan tenaga kerja menjadi dua yaitu tenaga kerja berpendidikan dan tenaga kerja tidak berpendidikan. Disini tenaga kerja berpendidikan diindikasikan dengan proporsi angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan lanjutan.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih banyaknya penawaran terhadap permintaan di bidang penawaran tenaga kerja.

2.1.2.4 Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia

(Subandi,2005) Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun ekonominya adalah masalah ketenagakerjaan. Lebih-lebih setelah mengalami setelah mengalami krisis multidimensi yang membawa bangsa Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi, politik, moral dan sosial. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran karena banyaknya bidangnya bidang usaha yang ditutup karena mengalami paailit. Disamping itu juga masih rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Dengan melihat kondisi diatas maka pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha,

sehingga setiap angkatan kerja memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 7 ayat 2 dan ini merupakan ciri khas dari sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan keupahan penjaminan kesejahteraan, perlindungan ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat. Disamping itu perlu peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja keluar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah digariskan oleh GBHN 1999-2004 maka program-program pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada:

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja diberbagai bidang usaha dan meningkatnya penerimaan devisa dari pengiriman TKI. Adapun sasarannya adalah memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri, serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatnya kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Adapun yang menjadi sasaran program ini adalah tersedianya tenaga

kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing yang tinggi baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

3. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketenagan bekerja dan berusaha, dan terciptanya hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sedangkan yang menjadi sasaran dari program ini adalah kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah

2.2.3.1 Definisi Pengeluaran Pemerintah

(Ichwan,1989) Pengeluaran pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan dibidang pengeluaran.

(Soediyono:135) Dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah maka pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang bisa dianggap sebagai tingkat Full employment. Dengan demikian apabila dalam perekonomian terdapat deflationary gap pemerintah pada umumnya mengusahakan meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Begitupun sebaliknya apabila dalam perekonomian terdapat inflationary gap, pemerintah umumnya mengusahakan menurunkan tingkat pendapatan dengan maksud untuk menghilangkan infaltionary gap.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir disegala bidang ekonomi.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, pendidikan, penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadiln Keuangan Negara Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

penangannya dalam bagan atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Belanja klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi dua bagian.

1. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial , belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
2. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaannya program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep pendapatan Nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel-variabel diruas kanan disebut sebagai permintaan agregat. Variabel G melambangkan pendapatan Pemerintah. Dengan membandingkan nilai X terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat

diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional(Dumaury,1996).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap akhir. Tahap awal pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar sebab pemerintah harus menyediakan prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tunggal landas namun investasi swasta sudah semakin membesar. Tahap lanjut pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana dan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat .(Mangkosoebroto,2008)

Peran pemerintah selalu meningkat dalam semua sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peran pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap penghasilan atau pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran yang bersangkutan.

2.2.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro Teori mikro.

Mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang – barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: Perubahan permintaan akan barang publik, Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan, Perubahan kualitas barang publik, Perubahan harga faktor – faktor produksi.

2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro.

1. Teori Keynes.

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam

perekonomian. Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

2. Teori Rostow dan Musgrave.

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap – tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Di tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas – aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

3. Teori Wagner.

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut teori apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organic theory of state*. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, Perkembangan demografi.

Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks

sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar.

2.2.3.3 Jenis jenis pengeluaran Pemerintah

Menurut (Suparmoko,1994) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
4. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Maka pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa negara, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek–proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif

sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Pengeluaran yang tidak self liquidating maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.

4. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah. Belanja rutin terdiri atas:

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan.
2. Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
3. Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik.

4. Belanja Perjalanan, yaitu biaya perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset Negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik sarana maupun prasarana fisik dan nonfisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi, juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus dipertimbangkan siapa yang akan dikerjakan atau meningkatnya pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang barang publik dan pelayanan masyarakat. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah secara makro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar.

Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Sejalan yang dikatakan Musgrave, jika pendapatan perkapita meningkat maka akan secara relative pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas pendapat lain dalam meningkatkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dibagi dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih baik.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 1993 : 169). Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurut Dumairy (1999 : 56) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Sementara itu menurut Sadono Sukirno (1994 : 168 - 169) ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam satu periode yaitu :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Ada kecenderungan semakin banyak pajak yang diterima maka semakin besar pengeluaran yang dilakukan.

2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah Tujuan – tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah yaitu mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka diperlukan dana yang besar yang salah satunya bersumber dari pajak. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran perlu diadakan perbaikan jalan dan sarana lainnya guna meningkatkan minat investasi swasta, Sering kali penerimaan yang berasal dari pajak tidak mencukupi maka terkadang keputusan untuk mencetak uang baru merupakan jalan yang diambil pemerintah.
3. Pertimbangan politik dan keamanan Stabilitas politik sering kali berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Seperti perang yang melanda suatu Negara. Hal ini tentu berdampak pada besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai perang, yang pada akhirnya juga mengganggu iklim investasi di Negara yang bersangkutan karena alasan keamanan.

2.2 Hubungan Antarvariabel

2.2.1 Hubungan Antarvariabel Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar

domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertumbuhan tenaga kerja tersebut.

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja sektor tradisional bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto adalah tenaga kerja.

2.2.2 Hubungan Antarvariabel Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus

menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan retribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelajaran dan peraturan moneter untuk mnggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakn fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk Nasional dan APBD untuk daerah dan wilayah. Tujuan dari kebijakn fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga ,tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan Ekonomi suatu negara membaik maka dengan otomatis PDRB suatu negara juga meningkat. Maka di perlukan untuk menaikkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan adalah retribusi daerah dan pajak. Retribusi daerah tidak dinaikkan tetapi melihat komponen retribusi daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Alat analisis dan Hasil penelitian
1.	Nofandillah Arumsyah Putri dan Aris Soelistyo(2018)	Analisis Pengaruh Upah,PDRB,dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasul a Tahun 2012-2016	Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan Model Random Effect (REM). Dipilihnya Model Random Effect (REM) karena model ini memiliki standart error lebih kecil dari pada Common Effet Model (CEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh negatif sebesar-0.069927 dan signifikan, variabel PDRB berpengaruh negatif sebesar -0.253666 dan signifikan, sedangkan variabel investasi berpengaruh Positif sebesar 0.599640 terhadap penyerapan tenaga kerja.
2.	Nurul Fitriani(2018)	Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015	Analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linier berganda dengan model <i>common effect</i> yang diolah dengan menggunakan <i>evIEWS-8</i> . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0644. 2) Pengeluaran Pemerintah

			berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,0001. 3) Secara simultan Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,000000. 4) Nilai <i>Adjusted R-squared</i> dalam penelitian ini adalah 0,517457 berarti nilai kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 51,74%.
3.	Rudi Hartono, Arfiah Busari, Muhammad Awaluddin (2018)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) dan Upah Minimum Kota (umk) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Dalam penelitian ini digunakan analisis cobb douglas, dengan sistem komputerisasi menggunakan SPSS. Hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama dalam Uji F, Kedua variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kota secara bersama-sama mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Samarinda. Kemudian dengan uji t, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Samarinda. Upah Minimum Kota berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Samarinda.
4.	Dama Himawan Yudistira, Lapien, Agnes L Ch Sumual Jacline I. (2016)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (tahun 2005-2014)	Alat analisis dari penelitian tersebut adalah analisis regresi sederhana. Hasil analisis memperlihatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado
5.	Ahmad Jazuli Rahman (2016)	Pengaruh Investasi, Pengeluaran	Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. dari hasil pengujian diperoleh nilai

		Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2010-2014	koefisien determinasi R^2 untuk model fixed effect sebesar 0,9987. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 99,87%. Hasil penelitian penelitian menyimpulkan bahwa secara serentak Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan hasil F Statistik 3,55 lebih besar dari F tabel yaitu 2,38. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
--	--	---	---

Sumber: Diolah 2019

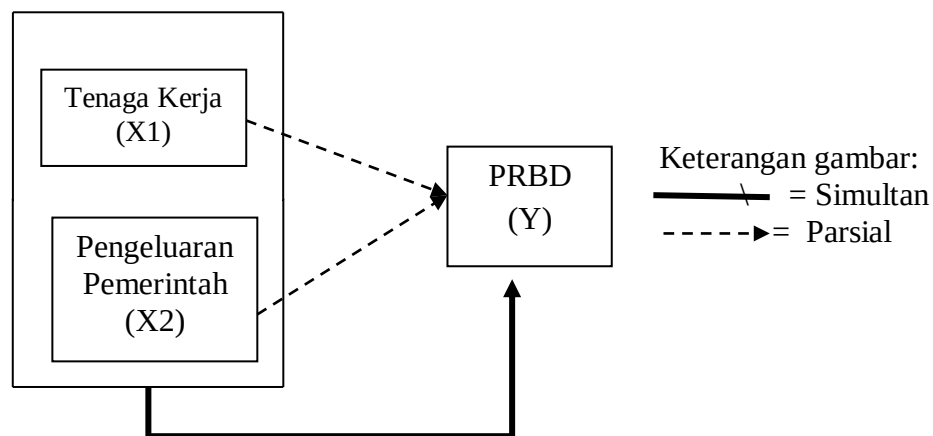
2.4 Kerangka Pikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Provinsi NTT. Penelitian ini didasari oleh teori yang dikembangkan oleh Solow- Swam yang memusatkan pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT maka diperlukan berbagai hal yang harus dicapai yaitu PDRB dari Provinsi NTT juga Meningkat. Sehingga dengan meningkatnya PDRB Provinsi NTT dapat Juga Meningkatkan Pengeluaran Pemerintah yang bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Juga dari sisi lain PDRB meningkat disebabkan oleh Tenaga Kerja yang

bekerja juga meningkat. Peningkatan tenaga kerja itu akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu peranan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan menaikkan total output, ada sesuatu yang penting yang sejalan dengan peran pemerintah dimana pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Skema itu dapat dilihat seperti paada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Teoritis

2.5 Hipotesis Skripsi

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 2.5.1 Diduga Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Parsial, secara signifikan dan positif (+) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi NTT Tahun 2012-2015.

2.5.2 Diduga Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Simultan, secara signifikan dan Positif (+) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi NTT Tahun 2012-2015.